

Media Online	Radarkudus.jawapos.com
Tanggal	08 Agustus 2025
Wilayah	Kabupaten Rembang



Anggaran Belanja Pegawai Rembang di APBD Perubahan Naik, Diproyeksikan Tembus Rp 1 Triliun

<https://radarkudus.jawapos.com/rembang/696406763/anggaran-belanja-pegawai-rembang-di-apbd-perubahan-naik-diproyeksikan-tembus-rp-1-triliun>

REMBANG - Alokasi belanja pegawai di Rembang diproyeksikan naik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.

Diperkirakan angkanya bisa melebihi Rp 1 triliun.

Anggota DPRD Rembang Puji Santoso menyampaikan, anggaran belanja pegawai akan tetap bertambah seiring dengan bertambahnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pada APBD Induk, belanja pegawai dirancang sekitar Rp 936 miliar.

Sementara, pada Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan, angkanya bertambah menjadi sekitar Rp 1,026 triliun.

"Jadi kalau saya mencermati kemarin dalam rencana KUA PPAS atau di APBD Induk itu munculnya di angka Rp 936 miliar," ujarnya.

"Terus pembahasan kemarin di KUA PPAS itu mencapai angka Rp 1,026 triliun, angka pastinya saya belum cek. Belanja pegawai segitu," katanya.

Ia menjelaskan jika komponen belanja pegawai itu terdiri dari gaji, tunjangan, hingga gaji ke-13.

"Komponennya banyak, mulai dari gaji, tunjangan, yang lain-lain, gaji ke-14, gaji ke-13, dan sebagainya," imbuhnya.

Di sisi lain, Pemkab Rembang juga perlu menyesuaikan alokasi belanja pegawai agar tidak melebihi 30 persen dari APBD.

Ketentuan ini harus mulai diterapkan pada 2027 mendatang.

"Tahun 2027, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah) dengan jangka waktu lima tahun setelah ditetapkan (UU HKPD), (belanja pegawai) harus di bawah 30 persen," jelasnya.

Apabila tidak, Puji menjelaskan, akan ada sanksi berupa pengurangan atau penundaan dana transfer dari pemerintah pusat.

"Intinya (UU HKPD) mendukung kemandirian daerah, mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, tidak bergantung pemerintah pusat," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan Rancangan KUA PPAS Perubahan, proyeksi pendapatan daerah direncanakan Rp 2,014 triliun.

Sementara, belanja daerah dirancang mencapai Rp 2,031 triliun, dan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sejumlah Rp 17,874 miliar.

Secara keseluruhan, belanja daerah mengalami kenaikan sekitar Rp 17,6 miliar dari APBD Induk yang direncanakan di angka Rp 2,014 triliun. (vah)